

APBN sebagai Mesin Pertumbuhan: Antara Stimulus, Defisit, dan Keberlanjutan Fiskal

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



STIMULUS FISKAL

Mendorong permintaan
dan aktivitas ekonomi



BELANJA PRODUKTIF

Investasi untuk
pertumbuhan jangka
panjang



DEFISIT TERKENDALI

Menjaga ruang fiskal
tanpa mengorbankan
keberlanjutan



PENERIMAAN NEGARA

Optimalisasi pajak,
kepabeanan, PNPB



PERLINDUNGAN SOSIAL

Melindungi masyarakat,
mengurangi kerentanan



PEMBIAYAAN APBN

Sumber pembiayaan
yang aman, efisien,
dan berkelanjutan



KEBERLANJUTAN FISKAL

Menjaga kesehatan fiskal
untuk generasi mendatang

INDIKATOR FISKAL SEHAT

- ✓ Rasio Utang Terjaga
- ✓ Defisit Terkendali
- ✓ Kualitas Belanja Efektif



INFRASTRUKTUR & SDM

Membangun fondasi
daya saing bangsa



STABILITAS MAKRO

Menjaga inflasi rendah,
nilai tukar stabil, dan
kepercayaan pasar



PERTUMBUHAN INKLUSIF

Pertumbuhan tinggi,
berkeadilan, dan
berkelanjutan



APBN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI



"FISKAL SEHAT, EKONOMI KUAT, INDONESIA MAJU"



AKUNTABEL



EFEKTIF



EFISIEN



TRANSPARAN



BERKELANJUTAN

*Rudy C Tarumingkeng: APBN sebagai Mesin Pertumbuhan: Antara
Stimulus, Defisit, dan Keberlanjutan Fiskal*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

12 Juni 2026

APBN SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN: ANTARA STIMULUS, DEFISIT, DAN KEBERLANJUTAN FISKAL

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pendapatan dan belanja pemerintah, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makro, memperluas perlindungan sosial, dan membiayai transformasi struktural. Dalam konteks Indonesia kontemporer, APBN berada pada posisi yang semakin kompleks: di satu sisi dituntut menjadi mesin pertumbuhan melalui belanja produktif, stimulus permintaan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, dan perlindungan sosial; di sisi lain APBN harus menjaga defisit, pembiayaan utang, kredibilitas pasar, dan kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang. Artikel ini membahas APBN sebagai mesin pertumbuhan dengan menelaah relasi antara stimulus fiskal, defisit anggaran, pembiayaan, kualitas belanja, ruang fiskal, risiko fiskal, serta keberlanjutan utang. Secara teoritis, efektivitas APBN sebagai stimulus sangat bergantung pada besarnya pengganda fiskal, kondisi siklus ekonomi, kualitas institusi, kredibilitas kebijakan, serta posisi fiskal awal. Secara empiris, APBN Indonesia 2026 menunjukkan orientasi ekspansif namun tetap diarahkan dalam koridor disiplin fiskal, dengan target pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Realisasi hingga 31

Mei 2026 menunjukkan pendapatan negara Rp1.185,0 triliun, belanja negara Rp1.365,4 triliun, defisit Rp180,4 triliun atau 0,70 persen PDB, serta keseimbangan primer surplus Rp58,6 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa APBN bekerja sebagai instrumen ekspansi sekaligus harus tetap dijaga kredibilitasnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa APBN dapat menjadi mesin pertumbuhan apabila defisit diarahkan untuk belanja produktif, subsidi semakin tepat sasaran, penerimaan negara diperkuat, pembiayaan dikelola pruden, dan tata kelola fiskal diperkuat secara transparan, adaptif, serta berorientasi antargenerasi. ([Kemenkeu Media](#))

Kata kunci: *APBN, stimulus fiskal, defisit anggaran, keberlanjutan fiskal, pengganda fiskal, pembiayaan utang, belanja produktif, ruang fiskal, risiko fiskal, Indonesia.*

1. Pendahuluan

APBN adalah salah satu instrumen terpenting dalam kehidupan bernegara. Ia bukan sekadar catatan administratif mengenai berapa besar pemerintah memperoleh pendapatan dan berapa besar pemerintah membelanjakannya. APBN adalah cerminan pilihan politik-ekonomi negara: sektor mana yang diprioritaskan, kelompok masyarakat mana yang dilindungi, wilayah mana yang dibangun, risiko apa yang diantisipasi, dan masa depan seperti apa yang hendak dibentuk. Dalam pengertian ini, APBN adalah “mesin pertumbuhan” sekaligus “cermin nilai publik”.

Dalam perekonomian modern, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, APBN memiliki fungsi ganda. Pertama, APBN menjalankan fungsi alokasi, yaitu mengarahkan sumber daya negara ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan, energi, perlindungan sosial, pertahanan, transformasi digital, dan pembangunan wilayah. Kedua,

APBN menjalankan fungsi distribusi, yaitu mengoreksi ketimpangan melalui subsidi, bantuan sosial, transfer ke daerah, dan program afirmatif. Ketiga, APBN menjalankan fungsi stabilisasi, yaitu meredam gejolak ekonomi, menjaga daya beli, mengurangi dampak krisis, dan menciptakan kepercayaan pasar.

Namun, fungsi APBN sebagai mesin pertumbuhan tidak pernah bebas risiko. Ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk mendorong permintaan agregat dan membiayai pembangunan, muncul pertanyaan mengenai sumber pembiayaannya. Jika pendapatan negara tidak cukup, maka defisit menjadi pilihan. Defisit dapat dibenarkan apabila digunakan untuk membiayai investasi produktif dan menjaga momentum ekonomi. Tetapi defisit juga dapat menjadi masalah apabila membiayai belanja yang tidak produktif, bersifat konsumtif, tidak tepat sasaran, atau menimbulkan beban utang yang makin berat bagi generasi mendatang.

Di sinilah ketegangan utama kebijakan fiskal muncul: APBN harus cukup ekspansif untuk mendorong pertumbuhan, tetapi cukup pruden untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah tidak dapat hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek dengan mengabaikan kesehatan fiskal. Sebaliknya, pemerintah juga tidak dapat terlalu ketat secara fiskal apabila masyarakat, dunia usaha, dan daerah masih memerlukan dukungan negara. Seni mengelola APBN terletak pada kemampuan menyeimbangkan stimulus, defisit, dan keberlanjutan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin penting karena APBN berada di tengah perubahan besar: dinamika geopolitik global, fluktuasi harga energi dan pangan, tekanan nilai tukar, kebutuhan belanja sosial, transisi energi, digitalisasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia. APBN bukan hanya instrumen pembiayaan rutin pemerintahan, tetapi juga instrumen transformasi struktural.

APBN 2026 memperlihatkan orientasi ekspansif yang diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat pembangunan

prioritas. Kementerian Keuangan mencatat postur APBN 2026 dengan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan mencapai Rp1.185,0 triliun, belanja Rp1.365,4 triliun, dan defisit Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap PDB. Data ini menunjukkan APBN sedang bekerja secara ekspansif, tetapi masih berada dalam kerangka pengendalian fiskal yang terukur. ([Kemenkeu Media](#))

Artikel ini membahas secara akademik bagaimana APBN dapat menjadi mesin pertumbuhan, bagaimana stimulus fiskal bekerja, kapan defisit dapat dibenarkan, bagaimana risiko pembiayaan harus dikelola, serta syarat apa yang diperlukan agar kebijakan fiskal tetap berkelanjutan. Fokus utama artikel ini bukan hanya pada angka-angka APBN, tetapi pada logika kebijakan di balik angka tersebut.

2. APBN sebagai Instrumen Kebijakan Publik dan Ekonomi Makro

APBN memiliki posisi unik karena menghubungkan ekonomi, politik, hukum, dan administrasi publik. Dari sisi ekonomi, APBN memengaruhi konsumsi, investasi, produksi, kesempatan kerja, inflasi, nilai tukar, dan distribusi pendapatan. Dari sisi politik, APBN adalah hasil negosiasi antara pemerintah, DPR, birokrasi, daerah, kelompok kepentingan, dan masyarakat. Dari sisi hukum, APBN ditetapkan melalui undang-undang sehingga memiliki kekuatan formal. Dari sisi administrasi publik, APBN menjadi pedoman pelaksanaan program pemerintah.

Sebagai instrumen makroekonomi, APBN bekerja melalui beberapa saluran. Pertama, belanja pemerintah meningkatkan permintaan agregat. Ketika pemerintah membangun jalan, membayar gaji guru, membeli alat kesehatan, memberi bantuan sosial, atau membiayai proyek infrastruktur, uang mengalir ke rumah tangga, perusahaan, kontraktor, pekerja, dan daerah. Kedua, APBN dapat memperbaiki sisi penawaran ekonomi melalui investasi publik. Infrastruktur yang baik menurunkan biaya logistik;

pendidikan dan kesehatan memperbaiki produktivitas manusia; riset dan digitalisasi meningkatkan inovasi. Ketiga, APBN berperan sebagai penyangga ketika terjadi krisis. Pada masa pandemi, misalnya, APBN digunakan untuk bantuan sosial, kesehatan, dukungan UMKM, dan pemulihan ekonomi.

Dalam perspektif Keynesian, belanja pemerintah dapat menghasilkan efek pengganda fiskal. Artinya, satu rupiah belanja pemerintah dapat menghasilkan kenaikan output lebih dari satu rupiah apabila belanja tersebut memicu konsumsi dan investasi lanjutan. Namun, besarnya pengganda tidak otomatis. Literatur menunjukkan bahwa pengganda fiskal cenderung lebih besar ketika ekonomi berada dalam resesi atau kapasitas menganggur, dan lebih kecil ketika ekonomi sudah mendekati kapasitas penuh. Auerbach dan Gorodnichenko menemukan bahwa efektivitas kebijakan fiskal berbeda antara periode resesi dan ekspansi; belanja pemerintah cenderung memiliki dampak lebih besar pada masa resesi.

([NBER](#))

Bagi Indonesia, logika ini penting. Ketika permintaan domestik melemah, APBN dapat menjadi penopang konsumsi dan investasi. Tetapi ketika inflasi, nilai tukar, atau suku bunga berada dalam tekanan, stimulus fiskal harus lebih selektif. APBN yang terlalu ekspansif tanpa kualitas belanja dapat mendorong tekanan harga, memperlebar defisit, dan menurunkan kepercayaan pasar. Sebaliknya, APBN yang terlalu konservatif dapat membuat pembangunan tersendat dan potensi pertumbuhan tidak tercapai.

Karena itu, pertanyaan terpenting bukan sekadar “berapa besar belanja negara?”, melainkan “belanja untuk apa, kepada siapa, di mana, melalui mekanisme apa, dan dengan hasil apa?” APBN sebagai mesin pertumbuhan tidak ditentukan oleh besarnya anggaran semata, tetapi oleh kualitas belanja dan kemampuan kebijakan fiskal mengubah belanja menjadi produktivitas.

3. Stimulus Fiskal: Antara Permintaan Jangka Pendek dan Produktivitas Jangka Panjang

Stimulus fiskal adalah tindakan pemerintah untuk memperkuat aktivitas ekonomi melalui peningkatan belanja, pengurangan pajak, subsidi, bantuan sosial, insentif, atau kombinasi berbagai instrumen. Stimulus dapat bekerja melalui sisi permintaan maupun sisi penawaran.

Pada sisi permintaan, stimulus meningkatkan daya beli masyarakat. Bantuan sosial, subsidi energi, subsidi pangan, bantuan pendidikan, dan dukungan UMKM dapat menjaga konsumsi rumah tangga. Dalam ekonomi seperti Indonesia, konsumsi rumah tangga merupakan komponen penting pertumbuhan. Ketika daya beli masyarakat melemah, APBN dapat mencegah penurunan konsumsi yang lebih dalam.

Pada sisi penawaran, stimulus bekerja melalui belanja produktif. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, riset, digitalisasi, irigasi, pelabuhan, energi, dan konektivitas dapat menaikkan produktivitas jangka panjang. Belanja semacam ini bukan hanya memberi dorongan sementara, tetapi memperbaiki kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, APBN sebagai mesin pertumbuhan harus menggabungkan stimulus jangka pendek dengan investasi jangka panjang.

Namun, tidak semua stimulus sama efektifnya. Ilzetzki, Mendoza, dan Végh menunjukkan bahwa pengganda fiskal dipengaruhi oleh karakteristik negara, termasuk tingkat pembangunan, rezim nilai tukar, keterbukaan ekonomi, dan tingkat utang. Dalam ekonomi yang sangat terbuka, sebagian stimulus dapat bocor ke impor. Dalam kondisi utang tinggi, stimulus dapat menimbulkan kekhawatiran pasar sehingga efeknya melemah. ([IDEAS/RePEc](#))

Bagi Indonesia, hal ini berarti stimulus APBN harus dirancang secara kontekstual. Belanja infrastruktur yang memiliki kandungan impor tinggi mungkin kurang efektif apabila tidak diikuti penguatan industri domestik. Subsidi energi yang besar dapat menjaga daya beli, tetapi juga dapat

membebani APBN jika harga minyak melonjak. Insentif pajak dapat menarik investasi, tetapi jika tidak tepat sasaran dapat menjadi kehilangan penerimaan tanpa tambahan investasi nyata. Bantuan sosial dapat efektif bila menyasar kelompok berpendapatan rendah yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi.

Stimulus fiskal juga harus memperhatikan waktu. Belanja yang terlambat sering kehilangan daya dorong. Jika proyek baru berjalan pada akhir tahun, dampaknya terhadap ekonomi tahun berjalan menjadi terbatas. Karena itu, akselerasi belanja sejak awal tahun sering dipandang penting. Namun percepatan belanja harus tetap disertai tata kelola yang baik agar tidak mendorong pemborosan atau penurunan kualitas proyek.

Data realisasi APBN hingga Mei 2026 menunjukkan belanja negara tumbuh lebih cepat, yaitu 34,4 persen secara tahunan, sementara pendapatan negara tumbuh 19,1 persen. Pemerintah menyatakan bahwa APBN terus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan defisit tetap dijaga dalam batas aman. Ini menunjukkan orientasi stimulus fiskal yang aktif, tetapi tetap menuntut kehati-hatian dalam pengendalian defisit dan kualitas belanja. ([Kemenkeu Media](#))

4. Defisit Anggaran: Masalah atau Instrumen?

Defisit anggaran terjadi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Secara awam, defisit sering dipandang negatif karena diasosiasikan dengan utang. Namun dalam teori dan praktik fiskal modern, defisit tidak selalu buruk. Defisit dapat menjadi instrumen pembangunan apabila dikelola secara pruden, transparan, dan diarahkan untuk belanja produktif.

Defisit dapat dibenarkan dalam beberapa kondisi. Pertama, ketika ekonomi melemah dan pemerintah perlu melakukan kebijakan kontra-siklus. Dalam situasi ini, pengurangan defisit secara tergesa-gesa justru dapat memperburuk kontraksi ekonomi. Kedua, ketika defisit digunakan untuk

investasi publik yang meningkatkan kapasitas produksi. Jika utang membiayai proyek dengan manfaat ekonomi jangka panjang, maka generasi mendatang tidak hanya mewarisi beban utang, tetapi juga aset produktif. Ketiga, ketika negara menghadapi keadaan luar biasa seperti pandemi, bencana alam, krisis pangan, atau tekanan global.

Namun, defisit menjadi berbahaya apabila digunakan untuk belanja yang tidak meningkatkan produktivitas, tidak tepat sasaran, atau tidak memiliki dampak sosial-ekonomi yang jelas. Defisit juga menjadi masalah apabila dibiayai dengan utang mahal, berjangka pendek, dalam valuta asing yang rentan terhadap risiko nilai tukar, atau ketika pasar meragukan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal.

Indonesia memiliki aturan fiskal yang membatasi defisit anggaran dan rasio utang. Kerangka fiskal Indonesia dikenal dengan batas defisit 3 persen terhadap PDB dan rasio utang maksimal 60 persen terhadap PDB. Kementerian Keuangan menyebut kaidah fiskal tersebut sebagai batasan defisit anggaran 3 persen terhadap PDB dan rasio utang maksimal 60 persen terhadap PDB. ([Anggaran Kemenkeu](#))

APBN 2026 dirancang dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB. Bank Indonesia dalam Republic of Indonesia Presentation Book Maret 2026 menyebut defisit fiskal 2026 diproyeksikan 2,68 persen terhadap PDB, berada di bawah ambang 3 persen, dengan prioritas kebijakan pada peningkatan kualitas belanja, penguatan modal manusia, ketahanan pangan dan energi, serta transformasi struktural. ([Bank Indonesia](#))

Dengan demikian, defisit harus dilihat bukan sebagai dosa fiskal, tetapi sebagai instrumen yang harus diuji kualitasnya. Pertanyaan kuncinya adalah: apakah defisit tersebut menciptakan nilai tambah? Apakah defisit memperbaiki produktivitas? Apakah defisit menjaga kelompok rentan? Apakah defisit memperkuat daya saing? Apakah defisit masih dapat dibiayai dengan biaya dan risiko yang terkendali? Jika jawabannya positif, defisit dapat menjadi bagian dari strategi pertumbuhan. Jika tidak, defisit hanya menjadi beban masa depan.

5. Keberlanjutan Fiskal: Menjaga APBN Sehat Antargenerasi

Keberlanjutan fiskal berarti kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban belanja dan utangnya dalam jangka panjang tanpa harus melakukan penyesuaian drastis yang merusak pertumbuhan atau kesejahteraan. Konsep ini tidak hanya menyangkut besarnya utang, tetapi juga struktur utang, biaya bunga, pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, kualitas belanja, dan kredibilitas institusi.

Secara sederhana, keberlanjutan utang dipengaruhi oleh hubungan antara tingkat bunga dan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi nominal lebih tinggi daripada biaya bunga utang, rasio utang terhadap PDB lebih mudah dikendalikan. Blanchard menekankan bahwa biaya fiskal utang publik lebih rendah ketika tingkat bunga aman berada di bawah tingkat pertumbuhan, tetapi hal ini tidak berarti utang dapat ditambah tanpa batas; risiko tetap muncul apabila kondisi bunga, pertumbuhan, atau kepercayaan pasar berubah. ([American Economic Association](#))

Dalam konteks negara berkembang, kehati-hatian lebih penting karena risiko nilai tukar, risiko aliran modal keluar, dan premi risiko lebih besar daripada negara maju. Negara berkembang tidak selalu dapat membiayai defisit dengan biaya murah dan mata uang sendiri secara penuh. Karena itu, ruang fiskal harus dijaga. Ruang fiskal adalah kemampuan pemerintah meningkatkan belanja atau menurunkan pajak tanpa mengancam stabilitas makro dan keberlanjutan utang.

Huidrom, Kose, Lim, dan Ohnsorge menunjukkan bahwa pengganda fiskal cenderung lebih kecil ketika posisi fiskal lemah. Melalui saluran Ricardian, rumah tangga dapat mengurangi konsumsi karena mengantisipasi kenaikan pajak di masa depan; melalui saluran suku bunga, investor dapat meminta premi risiko lebih tinggi sehingga biaya pembiayaan naik dan investasi swasta terdesak. ([IDEAS/RePEc](#))

Dengan kata lain, APBN yang sehat justru memperkuat efektivitas stimulus. Ketika pasar percaya bahwa pemerintah mampu mengendalikan defisit dan utang, belanja pemerintah lebih mungkin mendorong aktivitas ekonomi tanpa memicu kepanikan. Sebaliknya, jika fiskal dianggap tidak terkendali, stimulus dapat kehilangan daya dorong karena dibayangi ekspektasi pengetatan fiskal, kenaikan pajak, inflasi, atau kenaikan suku bunga.

Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 menyatakan bahwa defisit anggaran dijaga dalam batas aman dan risiko terkendali. Defisit menurun dari 6,14 persen terhadap PDB pada 2020 menjadi 4,57 persen pada 2021, 2,35 persen pada 2022, 1,61 persen pada 2023, dan 2,30 persen pada 2024; outlook 2025 berada pada kisaran 2,78 persen, sedangkan RAPBN 2026 semula direncanakan 2,48 persen sebelum APBN final menjadi 2,68 persen. ([Kemenkeu Media](#))

Keberlanjutan fiskal juga menuntut keseimbangan primer yang sehat. Keseimbangan primer adalah selisih pendapatan negara dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan primer terus defisit, pemerintah harus berutang bukan hanya untuk membiayai program, tetapi juga untuk membayar bunga utang. Ini dapat menciptakan spiral utang. Karena itu, surplus keseimbangan primer hingga Mei 2026 sebesar Rp58,6 triliun merupakan indikator yang penting, walaupun perlu dilihat secara penuh hingga akhir tahun anggaran. ([Kemenkeu Media](#))

6. APBN 2026: Ekspansif, Pruden, dan Berorientasi Prioritas

APBN 2026 merupakan contoh konkret bagaimana negara mencoba menyeimbangkan stimulus, defisit, dan keberlanjutan fiskal. Postur APBN 2026 memperlihatkan belanja yang besar untuk menjalankan prioritas nasional, tetapi defisit tetap dijaga di bawah batas 3 persen terhadap PDB. Hingga Mei 2026, realisasi APBN menunjukkan pendapatan negara Rp1.185,0 triliun atau 37,6 persen dari APBN, belanja negara Rp1.365,4

triliun atau 35,5 persen dari APBN, dan defisit Rp180,4 triliun atau 0,70 persen PDB. ([Kemenkeu Media](#))

Struktur APBN 2026 memperlihatkan beberapa karakter penting. Pertama, pendapatan negara masih sangat bergantung pada penerimaan perpajakan. Target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,7 triliun menunjukkan bahwa pajak tetap menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Kedua, belanja pemerintah pusat mendominasi belanja negara, dengan pagu Rp3.149,7 triliun, sementara transfer ke daerah sebesar Rp693,0 triliun. Ketiga, defisit Rp689,1 triliun menunjukkan bahwa pembiayaan tetap menjadi bagian penting dari strategi fiskal. ([Kemenkeu Media](#))

APBN 2026 juga diarahkan untuk menjadi shock absorber dan penggerak ekonomi. Dalam laporan APBN KiTa Juni 2026, pemerintah menyatakan bahwa hingga akhir Mei 2026, APBN optimal berperan sebagai shock absorber dan penggerak ekonomi, pendapatan negara tumbuh kuat, belanja tetap ekspansif untuk melindungi masyarakat, dan pasar keuangan serta kepercayaan investor tetap dijaga. ([Kemenkeu Media](#))

Di sinilah APBN memainkan peran strategis. Ketika ekonomi global menghadapi ketidakpastian, APBN menjaga konsumsi domestik, mendukung aktivitas sektor riil, dan memberi sinyal bahwa negara hadir. Tetapi pada saat yang sama, APBN harus menjaga kredibilitas fiskal agar stimulus tidak berubah menjadi tekanan makro. Karena itu, ekspansi fiskal harus dibaca bersama dengan disiplin pembiayaan, pengendalian defisit, dan peningkatan kualitas belanja.

7. Kualitas Belanja: Jantung APBN sebagai Mesin Pertumbuhan

Kualitas belanja adalah inti dari APBN sebagai mesin pertumbuhan. Belanja yang besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan tinggi. Banyak negara memiliki belanja publik besar, tetapi dampaknya lemah karena

kebocoran, korupsi, salah sasaran, birokrasi lambat, proyek tidak produktif, atau tidak ada evaluasi kinerja.

Belanja berkualitas memiliki beberapa ciri. Pertama, belanja tersebut memiliki dampak ekonomi atau sosial yang jelas. Kedua, belanja diarahkan ke sektor yang memiliki multiplier tinggi. Ketiga, belanja memiliki target penerima yang tepat. Keempat, belanja dilaksanakan tepat waktu. Kelima, belanja dapat diukur hasilnya. Keenam, belanja tidak hanya menghasilkan output administratif, tetapi outcome pembangunan.

Contoh belanja produktif adalah infrastruktur dasar yang menurunkan biaya logistik, pendidikan yang meningkatkan keterampilan tenaga kerja, kesehatan yang memperbaiki produktivitas manusia, irigasi yang meningkatkan ketahanan pangan, digitalisasi layanan publik yang menurunkan biaya transaksi, dan riset yang mendorong inovasi. Sebaliknya, belanja yang hanya bersifat seremonial, duplikatif, tidak terukur, atau tidak menjawab kebutuhan publik akan melemahkan fungsi APBN.

APBN KiTa Juni 2026 mencatat realisasi pembiayaan investasi hingga Mei 2026 sebesar Rp35,45 triliun, antara lain untuk pengadaan cadangan beras dan gabah oleh Bulog, pengadaan lahan proyek strategis nasional oleh LMAN, pooling fund bencana, program FLPP, dan pinjaman daerah oleh PT SMI. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan fiskal tidak hanya menutup defisit, tetapi juga diarahkan ke instrumen investasi publik dan perlindungan sosial-ekonomi. ([Kemenkeu Media](#))

Namun, belanja produktif harus terus diuji. Misalnya, belanja infrastruktur harus dievaluasi apakah benar menurunkan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas daerah. Belanja pendidikan harus dievaluasi apakah meningkatkan kompetensi, literasi, numerasi, kreativitas, dan kemampuan digital. Belanja kesehatan harus dilihat apakah memperbaiki akses dan kualitas layanan. Belanja subsidi harus diuji apakah diterima oleh kelompok yang tepat.

Dalam perspektif manajemen publik modern, APBN tidak cukup menggunakan pendekatan input-based budgeting, yaitu sekadar berapa uang dialokasikan. APBN harus semakin bergerak ke performance-based budgeting, yaitu mengaitkan anggaran dengan hasil. Dengan kata lain, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak hanya bertanya "berapa pagu saya?", tetapi "apa hasil yang harus saya capai dengan pagu tersebut?"

8. Defisit Produktif dan Defisit Konsumtif

Tidak semua defisit memiliki kualitas yang sama. Defisit produktif adalah defisit yang digunakan untuk membiayai belanja yang meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas ekonomi, atau melindungi masyarakat dari guncangan yang dapat menurunkan potensi pertumbuhan. Defisit konsumtif adalah defisit yang membiayai pengeluaran rutin tanpa dampak produktif yang jelas.

Defisit produktif dapat dianalogikan dengan rumah tangga yang mengambil pinjaman untuk pendidikan anak, memperbaiki rumah agar produktif, atau membuka usaha. Pinjaman tersebut memiliki manfaat jangka panjang. Defisit konsumtif mirip dengan berutang untuk konsumsi sementara tanpa peningkatan pendapatan masa depan. Negara tentu berbeda dari rumah tangga, tetapi analogi ini membantu menjelaskan pentingnya kualitas penggunaan defisit.

Dalam APBN, defisit produktif dapat muncul melalui belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, riset, konektivitas, transformasi energi, dan perlindungan sosial yang mencegah kemiskinan ekstrem. Sebaliknya, defisit menjadi kurang produktif apabila terlalu banyak terserap untuk birokrasi tidak efisien, subsidi tidak tepat sasaran, program populis jangka pendek, atau proyek yang tidak memiliki manfaat ekonomi.

Literatur fiskal menunjukkan bahwa dampak defisit sangat bergantung pada konteks. Defisit yang digunakan ketika ekonomi lesu dapat memiliki

dampak positif lebih besar, tetapi defisit pada kondisi fiskal lemah dapat menurunkan efektivitas stimulus. Karena itu, strategi terbaik bukan menolak defisit secara mutlak, melainkan memastikan defisit memiliki justifikasi ekonomi, sosial, dan antargenerasi.

Dalam konteks Indonesia, defisit 2,68 persen terhadap PDB pada APBN 2026 masih berada di bawah batas 3 persen. Tetapi batas hukum bukan satu-satunya ukuran kesehatan fiskal. Defisit 2,68 persen dapat sehat apabila belanja produktif, penerimaan negara kuat, biaya utang terkendali, dan risiko fiskal dimitigasi. Sebaliknya, defisit yang sama dapat berisiko apabila kualitas belanja rendah dan penerimaan melemah.

9. Pembiayaan Utang dan Risiko Pasar

Defisit harus dibiayai. Pembiayaan dapat berasal dari penerbitan surat berharga negara, pinjaman, penggunaan saldo anggaran lebih, pembiayaan investasi, atau instrumen lainnya. Dalam APBN modern, pembiayaan bukan sekadar menutup kekurangan kas, tetapi bagian dari strategi manajemen fiskal dan pasar keuangan.

APBN KiTa Juni 2026 mencatat pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2026 sebesar Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari APBN. Pembiayaan utang mencapai Rp386,0 triliun atau 46,4 persen dari APBN, sementara pembiayaan nonutang tercatat negatif Rp6,5 triliun. Pemerintah menyatakan pembiayaan APBN 2026 dikelola secara pruden dan terukur, dengan memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas, dan dinamika pasar keuangan. ([Kemenkeu Media](#))

Risiko pembiayaan muncul dari beberapa sumber. Pertama, risiko suku bunga. Jika yield surat berharga naik, biaya utang meningkat. Kedua, risiko nilai tukar. Jika sebagian utang berdenominasi valuta asing, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran. Ketiga, risiko refinancing. Jika banyak utang jatuh tempo dalam waktu dekat, pemerintah harus

menerbitkan utang baru untuk membayar utang lama. Keempat, risiko kepercayaan pasar. Jika investor meragukan disiplin fiskal, premi risiko naik.

Karena itu, pembiayaan defisit harus memperhatikan struktur jatuh tempo, komposisi mata uang, basis investor, kedalaman pasar domestik, dan koordinasi fiskal-moneter. APBN tidak dapat bekerja sendiri. Stabilitas fiskal membutuhkan dukungan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kredibilitas kebijakan makro secara keseluruhan.

Bank Indonesia menekankan bahwa kerangka kebijakan Indonesia bertujuan menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dengan defisit fiskal 2026 di bawah 3 persen, rasio utang terhadap PDB yang rendah, dan prioritas pada kualitas belanja serta transformasi struktural. ([Bank Indonesia](#))

10. Penerimaan Negara: Fondasi Kemandirian Fiskal

APBN yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengendalikan belanja, tetapi juga oleh kemampuan memperkuat pendapatan negara. Negara yang ingin membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, perlindungan sosial, dan transformasi ekonomi membutuhkan penerimaan yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam APBN 2026, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.693,7 triliun dari total pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Hingga 31 Mei 2026, penerimaan perpajakan terealisasi Rp958,2 triliun atau 35,6 persen dari APBN dan tumbuh 18,9 persen secara tahunan. Penerimaan pajak terealisasi Rp834,4 triliun dan tumbuh 22,1 persen. ([Kemenkeu Media](#))

Tantangan utama penerimaan negara adalah memperluas basis pajak tanpa mematikan aktivitas ekonomi. Pajak yang terlalu rendah melemahkan kapasitas negara; pajak yang terlalu tinggi atau tidak adil dapat menghambat investasi dan kepatuhan. Karena itu, reformasi perpajakan

harus menyeimbangkan efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan administrasi.

Penguatan penerimaan dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Pertama, perluasan basis pajak melalui formalitas ekonomi. Banyak aktivitas ekonomi digital, UMKM, dan sektor informal perlu masuk sistem perpajakan secara proporsional. Kedua, peningkatan kepatuhan melalui digitalisasi administrasi, integrasi data, dan pelayanan yang lebih mudah. Ketiga, pengurangan kebocoran dan penghindaran pajak. Keempat, desain insentif pajak yang selektif dan berbasis evaluasi. Kelima, penguatan PNBP dari sumber daya alam dan layanan publik tanpa merusak keberlanjutan lingkungan.

Penerimaan negara juga berkaitan dengan legitimasi. Warga lebih bersedia membayar pajak apabila melihat bahwa pajak dikelola secara transparan dan menghasilkan layanan publik yang nyata. Dengan demikian, pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi kontrak sosial antara negara dan warga.

11. Subsidi, Perlindungan Sosial, dan Ketepatan Sasaran

Subsidi adalah instrumen penting APBN, terutama dalam menjaga daya beli dan stabilitas sosial. Subsidi energi, pangan, pupuk, bunga kredit, perumahan, dan bantuan sosial dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan harga. Namun subsidi juga dapat menjadi beban fiskal jika tidak tepat sasaran.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, program subsidi dijelaskan sebagai upaya meringankan beban masyarakat, menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa dengan harga terjangkau, serta mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah juga menekankan upaya subsidi BBM tepat sasaran melalui registrasi konsumen pengguna agar penyaluran lebih efisien. ([Kemenkeu Media](#))

Masalah subsidi bukan pada keberadaannya, tetapi pada desainnya. Subsidi yang diterima kelompok mampu akan mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan kelompok miskin. Subsidi harga juga sering kurang efisien karena semua konsumen menikmati harga murah, termasuk yang tidak membutuhkan. Alternatifnya adalah subsidi berbasis penerima atau bantuan langsung yang lebih tepat sasaran.

Dalam konteks APBN sebagai mesin pertumbuhan, subsidi harus berfungsi sebagai jembatan, bukan ketergantungan permanen. Subsidi dapat menjaga stabilitas dan daya beli, tetapi harus disertai strategi transisi menuju produktivitas: bantuan petani harus dihubungkan dengan peningkatan hasil, subsidi energi harus dikaitkan dengan transisi energi, bantuan sosial harus dihubungkan dengan penguatan kapasitas keluarga, dan subsidi UMKM harus mendorong naik kelas.

12. Risiko Fiskal: Ketidakpastian yang Harus Dikelola

APBN disusun berdasarkan asumsi makro: pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak, lifting minyak dan gas, serta berbagai indikator lain. Ketika asumsi berubah, APBN ikut terpengaruh. Nilai tukar yang melemah dapat meningkatkan beban subsidi dan pembayaran utang valuta asing. Harga minyak yang naik dapat meningkatkan subsidi energi. Pertumbuhan yang melemah dapat menurunkan penerimaan pajak. Suku bunga yang naik dapat meningkatkan biaya pembiayaan.

Nota Keuangan RAPBN 2026 menyebut risiko fiskal sebagai faktor atau kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang dapat memengaruhi kesinambungan APBN, aset, dan kewajiban negara. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor eksternal maupun internal, dan dapat memberi tekanan pada pendapatan, belanja, maupun pembiayaan APBN. ([Kemenkeu Media](#))

Peta risiko fiskal 2026 mencakup antara lain dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran; risiko mandatory spending; risiko program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan; risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur; risiko bencana; serta risiko inefisiensi belanja daerah.

([Kemenkeu Media](#))

Risiko fiskal harus dikelola melalui mitigasi. Pertama, pemerintah perlu membangun fiscal buffer, yaitu ruang cadangan untuk menghadapi gejolak. Kedua, asumsi makro harus realistis, bukan terlalu optimistis. Ketiga, belanja harus memiliki fleksibilitas agar dapat disesuaikan ketika kondisi berubah. Keempat, subsidi dan kompensasi harus dirancang agar tidak menjadi tekanan tak terkendali. Kelima, utang harus dikelola dengan strategi jatuh tempo dan mata uang yang hati-hati. Keenam, transparansi risiko fiskal harus diperkuat agar publik memahami potensi beban negara.

IMF dalam laporan konsultasi Article IV 2025 untuk Indonesia menyoroti risiko jangka pendek yang condong ke bawah, termasuk potensi guncangan perdagangan, ketidakpastian berkepanjangan, volatilitas pasar keuangan global, perubahan sentimen investor, tekanan nilai tukar, dan kenaikan yield sovereign. IMF juga memperkirakan rasio utang pemerintah umum Indonesia berada sekitar 41 persen PDB dalam proyeksi jangka menengah. ([IMF eLibrary](#))

13. APBN dan Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka PDB. Pertumbuhan harus inklusif, yaitu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, memperkuat daerah, serta memberi ruang bagi UMKM dan kelompok rentan. APBN memiliki peran penting dalam memastikan pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Transfer ke daerah adalah salah satu instrumen inklusi fiskal. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ketimpangan wilayah yang besar. Tanpa dukungan APBN, banyak daerah sulit membiayai layanan dasar. Namun, transfer ke daerah juga harus diikuti peningkatan kapasitas tata kelola daerah. Dana yang besar tidak otomatis menghasilkan pembangunan jika perencanaan lemah, korupsi tinggi, atau belanja daerah tidak produktif.

APBN juga dapat mendukung inklusi melalui perlindungan sosial. Bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi dapat mencegah kelompok miskin jatuh lebih dalam. Perlindungan sosial yang baik bukan sekadar belas kasihan, tetapi investasi sosial. Masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan terlindungi lebih mampu berpartisipasi dalam ekonomi.

Pertumbuhan inklusif juga membutuhkan dukungan bagi UMKM. UMKM adalah penyerap tenaga kerja besar, tetapi sering menghadapi kendala modal, teknologi, pasar, dan manajemen. APBN dapat membantu melalui subsidi bunga, kredit program, pelatihan, digitalisasi, akses pasar, dan infrastruktur logistik. Namun bantuan UMKM harus diarahkan untuk produktivitas, bukan hanya penyaluran dana.

14. APBN, Produktivitas, dan Transformasi Struktural

Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga pertumbuhan sekitar 5 persen, tetapi meningkatkan potensi pertumbuhan melalui produktivitas. Produktivitas tidak lahir dari belanja rutin, tetapi dari transformasi struktural: peningkatan kualitas manusia, inovasi, industrialisasi bernilai tambah, digitalisasi, efisiensi birokrasi, transisi energi, dan perbaikan iklim investasi.

APBN dapat mempercepat transformasi struktural melalui tiga jalur. Pertama, membiayai fondasi dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan riset. Kedua, memberi insentif bagi sektor strategis seperti hilirisasi, energi terbarukan, ekonomi digital, pangan, dan

manufaktur. Ketiga, memperkuat tata kelola agar investasi swasta masuk dengan percaya diri.

Namun APBN tidak dapat sendirian. Mesin pertumbuhan nasional harus melibatkan investasi swasta, BUMN, daerah, pasar modal, perbankan, lembaga pendidikan, dan masyarakat. APBN sebaiknya berfungsi sebagai katalis, bukan satu-satunya sumber pertumbuhan. Belanja negara harus menarik investasi tambahan, bukan menggantikan investasi swasta secara tidak efisien.

Dalam bahasa kebijakan, APBN harus crowding in, bukan crowding out. Artinya, belanja pemerintah harus mendorong investasi swasta melalui infrastruktur, kepastian regulasi, kualitas SDM, dan stabilitas makro. Jika defisit pemerintah justru menaikkan suku bunga dan mengurangi ruang kredit bagi swasta, maka terjadi crowding out. Inilah alasan mengapa defisit harus dikelola hati-hati.

15. Tata Kelola Fiskal: Transparansi, Akuntabilitas, dan Evaluasi

APBN sebagai mesin pertumbuhan memerlukan tata kelola yang kuat. Tanpa tata kelola, belanja besar dapat berubah menjadi pemborosan. Tata kelola fiskal mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengadaan, pengawasan, audit, evaluasi, dan pelaporan.

Transparansi penting agar publik mengetahui bagaimana uang negara dikumpulkan dan digunakan. Akuntabilitas penting agar pejabat publik bertanggung jawab atas hasil belanja. Evaluasi penting agar program yang tidak efektif dapat diperbaiki atau dihentikan. Digitalisasi penting agar data anggaran, data penerima manfaat, dan data kinerja dapat diintegrasikan.

Dalam era AI dan big data, tata kelola APBN dapat diperkuat melalui analitik fiskal. Pemerintah dapat menggunakan data untuk mendeteksi anomali belanja, memetakan penerima subsidi, memperkirakan risiko penerimaan, mengukur dampak program, dan memperbaiki targeting.

Namun digitalisasi juga harus dijaga dari bias algoritma, kesalahan data, dan risiko keamanan siber.

Tata kelola fiskal yang baik meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan publik memperkuat kepatuhan pajak. Kepercayaan investor menurunkan premi risiko. Kepercayaan daerah memperkuat koordinasi pusat-daerah. Dengan demikian, tata kelola bukan sekadar aspek administratif, tetapi bagian dari strategi pertumbuhan.

16. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, pemerintah perlu menjaga defisit dalam koridor pruden, tetapi tidak mengorbankan belanja produktif. Defisit harus diarahkan untuk investasi yang meningkatkan produktivitas dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Kedua, kualitas belanja harus menjadi prioritas utama. Setiap program besar perlu memiliki indikator hasil, evaluasi dampak, dan mekanisme koreksi. Belanja yang tidak efektif perlu dialihkan ke program yang lebih produktif.

Ketiga, subsidi perlu semakin tepat sasaran. Subsidi harga yang dinikmati kelompok mampu perlu secara bertahap diubah menjadi bantuan berbasis penerima yang lebih adil dan efisien.

Keempat, penerimaan negara harus diperkuat melalui reformasi perpajakan yang adil, digital, sederhana, dan berbasis kepatuhan. Peningkatan tax ratio perlu dilakukan tanpa menekan kelompok rentan dan tanpa menghambat investasi produktif.

Kelima, pembiayaan utang perlu dikelola dengan strategi risiko yang hati-hati. Struktur jatuh tempo, komposisi mata uang, biaya bunga, dan basis investor harus terus dijaga.

Keenam, APBN harus semakin menjadi katalis investasi swasta. Belanja publik sebaiknya diarahkan untuk menciptakan efek crowding in melalui infrastruktur, SDM, teknologi, dan kepastian regulasi.

Ketujuh, pemerintah perlu memperkuat fiskal buffer untuk menghadapi guncangan global, bencana, harga energi, dan tekanan pasar keuangan.

Kedelapan, koordinasi fiskal-moneter harus dijaga. APBN yang ekspansif harus selaras dengan kebijakan moneter agar pertumbuhan meningkat tanpa mengorbankan inflasi, nilai tukar, dan stabilitas keuangan.

17. Kesimpulan

APBN adalah mesin pertumbuhan apabila dikelola sebagai instrumen strategis, bukan sekadar daftar pendapatan dan belanja. APBN dapat mendorong permintaan agregat, membiayai pembangunan, melindungi masyarakat, memperkuat daerah, dan menciptakan fondasi produktivitas jangka panjang. Namun mesin ini hanya bekerja baik apabila bahan bakarnya tepat: pendapatan negara yang kuat, belanja berkualitas, defisit pruden, pembiayaan terukur, dan tata kelola transparan.

Stimulus fiskal diperlukan, terutama ketika ekonomi menghadapi ketidakpastian. Tetapi stimulus tidak boleh menjadi alasan untuk belanja tanpa prioritas. Defisit dapat dibenarkan, tetapi harus produktif. Utang dapat menjadi instrumen pembangunan, tetapi harus dikelola dengan disiplin. Keberlanjutan fiskal bukan berarti menolak ekspansi, melainkan memastikan ekspansi hari ini tidak merusak kemampuan negara membiayai masa depan.

APBN 2026 menunjukkan upaya menyeimbangkan ekspansi dan disiplin. Dengan belanja negara Rp3.842,7 triliun dan defisit 2,68 persen terhadap PDB, APBN diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan program prioritas, tetapi tetap dalam koridor fiskal. Realisasi hingga Mei 2026 memperlihatkan APBN bekerja aktif sebagai penggerak ekonomi, dengan

pendapatan dan belanja tumbuh serta defisit masih terkendali. ([Kemenkeu Media](#))

Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga defisit di bawah batas formal, tetapi memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata. APBN harus menjadi mesin pertumbuhan yang produktif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, APBN bukan hanya instrumen tahun anggaran, tetapi instrumen peradaban: membangun kapasitas bangsa hari ini tanpa menggadaikan masa depan generasi berikutnya.

Glossarium

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR dan ditetapkan dengan undang-undang.

Belanja Produktif

Belanja negara yang meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, kualitas manusia, infrastruktur, dan daya saing jangka panjang.

Defisit Anggaran

Kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran.

Fiscal Buffer

Cadangan atau ruang fiskal yang disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian, krisis, bencana, atau tekanan ekonomi.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Keberlanjutan Fiskal

Kemampuan pemerintah menjaga kesehatan APBN dan memenuhi kewajiban jangka panjang tanpa menciptakan krisis utang atau penyesuaian drastis.

Keseimbangan Primer

Selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Multiplier Fiskal

Ukuran dampak perubahan belanja pemerintah atau pajak terhadap output ekonomi.

Pembiayaan Anggaran

Sumber dana untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, antara lain melalui utang, investasi, pinjaman, dan penggunaan saldo anggaran.

Ruang Fiskal

Kemampuan pemerintah untuk menambah belanja atau memberi stimulus tanpa mengganggu stabilitas makro dan keberlanjutan fiskal.

Shock Absorber

Fungsi APBN sebagai penyerap guncangan ekonomi, misalnya akibat krisis global, kenaikan harga energi, pandemi, atau bencana.

Subsidi Tepat Sasaran

Subsidi yang diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada semua konsumen secara merata.

Tax Ratio

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, sering digunakan untuk mengukur kapasitas perpajakan suatu negara.

Daftar Pustaka

- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Fiscal multipliers in recession and expansion. Dalam A. Alesina & F. Giavazzi (Eds.), *Fiscal policy after the financial crisis* (pp. 63–98). University of Chicago Press. DOI: 10.7208/chicago/9780226018584.003.0003
- Blanchard, O. J. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229. DOI: 10.1257/aer.109.4.1197
- Égert, B. (2015). Public debt, economic growth and nonlinear effects: Myth or reality? *Journal of Macroeconomics*, 43, 226–238. DOI: 10.1016/j.jmacro.2014.11.006
- Huidrom, R., Kose, M. A., Lim, J. J., & Ohnsorge, F. L. (2020). Why do fiscal multipliers depend on fiscal positions? *Journal of Monetary Economics*, 114, 109–125. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2019.07.004
- Ilzetzi, E., Mendoza, E. G., & Végh, C. A. (2013). How big (small?) are fiscal multipliers? *Journal of Monetary Economics*, 60(2), 239–254. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2012.10.011
- Mauro, P., Romeu, R., Binder, A., & Zaman, A. (2015). A modern history of fiscal prudence and profligacy. *Journal of Monetary Economics*, 76, 55–70. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2015.07.003
- Mendoza, E. G., & Ostry, J. D. (2008). International evidence on fiscal solvency: Is fiscal policy “responsible”? *Journal of Monetary Economics*, 55(6), 1081–1093. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2008.06.003
- Mountford, A., & Uhlig, H. (2009). What are the effects of fiscal policy shocks? *Journal of Applied Econometrics*, 24(6), 960–992. DOI: 10.1002/jae.1079
- Ramey, V. A. (2011). Identifying government spending shocks: It’s all in the timing. *The Quarterly Journal of Economics*, 126(1), 1–50. DOI: 10.1093/qje/qjq008

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a time of debt. *American Economic Review*, 100(2), 573–578. DOI: 10.1257/aer.100.2.573

Romer, C. D., & Romer, D. H. (2010). The macroeconomic effects of tax changes: Estimates based on a new measure of fiscal shocks. *American Economic Review*, 100(3), 763–801. DOI: 10.1257/aer.100.3.763

Dokumen kebijakan dan data resmi

Bank Indonesia. (2026). *Republic of Indonesia presentation book: March 2026*. Bank Indonesia.

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia*. IMF Country Report.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2026: Buku II*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *APBN KiTa: Kinerja dan fakta, edisi Juni 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 12 Juni 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a2b94f7-be20-83ec-9571-86009e1ff5d4>